

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Obyek Penelitian

a. Sejarah Kabupaten Kudus

Kudus awalnya kota di tepi Sungai Gelis, dan salah satu kota di Pulau Muria. Dahulu Kota Kudus bernama Kota Tajug, disebut Tajug karena di daerah tersebut terdapat banyak Tajug, Tajug merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai tujuannya keramat. Tajug dahulunya di jadikan tempat bersembahyang warga Hindu di daerah tersebut. Dengan demikian kota Tajug dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan tertentu. Sunan Kudus mendekati warga kota Tajug dengan membuat struktur atas Menara Kudus yang berbentuk Tajug. Warga hidup dari bertani, membuat batu bata, menangkap ikan, dan berdagang. Setelah kedatangan Sunan Kudus, Kota itu dikenal sebagai "*Al-Quds*" yang berarti "Kudus". Kota Tajug memang sudah lama menjadi kota perdagangan, tetapi karena posisinya agak jauh dari Selat Muria, tidak ada pelabuhan besar di Kota Tajug, hanya pelabuhan transit, yang nanti akan transit lagi ke Pelabuhan Tanjung Karang di tepi Selat Muria. Pada saat itu, Selat Muria masih dalam dan lebar, sebagai jalan pintas perdagangan. Pelabuhan Tanjung Karang adalah pelabuhan transit penghubung ke pelabuhan Demak, Jepara dan Juwana. Komoditas utama ekspor Pelabuhan Tanjung Karang adalah kayu yang berasal dari muria, yang juga digunakan sebagai salah satu material pembangunan Masjid Agung Demak.

Pedagang dari Timur Tengah, Tiongkok, dan pedagang antar pulau dari sejumlah daerah di Nusantara berdagang kain, barang pecah belah, dan hasil pertanian di Tajug, tepatnya di Pelabuhan Tanjung Karang. Warga Tajug juga terinspirasi filosofi yang dihidupi Sunan Kudus, Gusjigang. Gus berarti *bagus*, ji berarti *mengaji*, dan gang berarti *berdagang*. Melalui filosofi itu, Sunan Kudus menuntun masyarakat menjadi orang berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berdagang. Dari pembauran lewat sarana perdagangan dan semangat "gusjigang" itulah

masyarakat Kudus mengenal dan mampu membaca peluang usaha. Dua di antaranya usaha batik dan jenang. Kini, selat muria sudah hilang ditelan sedimentasi, begitupun dengan Pelabuhan Tanjung Karang, hilang dan hancur ditelan sedimentasi.

Berdirinya Masjid Menara Kudus sebagai Hari Jadi Kabupaten Kudus. Masjid Menara Kudus tidak lepas dari peran Sunan Kudus sebagai pendiri dan pemrakarsa. Sebagaimana para walisongo yang lainnya, Sunan Kudus memiliki cara yang amat bijaksana dalam dakwahnya. Di antaranya, dia mampu melakukan adaptasi dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dengan mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Pencampuran budaya Hindu dan Budha dalam dakwah yang dilakukan Sunan Kudus, salah satunya dapat kita lihat pada masjid Menara Kudus ini. Masjid ini didirikan pada tahun 956 H atau 1549 M. Hal ini dapat diketahui dari inskripsi (prasasti) pada batu yang lebarnya 30 cm dan panjang 46 cm yang terletak pada mihrab masjid yang ditulis dalam bahasa Arab.

Sebenarnya, banyak orang salah paham dengan Menara Kudus. Masyarakat berpikir bahwa menara kudus dibangun bersama dengan Masjid Menara Kudus, padahal tidak. Menara Kudus sudah ada dari zaman Hindu-Buddha, dan umurnya jauh lebih tua dari Masjid Menara Kudus. Kini, kejayaan dan kemakmuran Kota Kudus karena perdagangan, terulang lagi karena Industri, dan posisi Kudus yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan Jawa. Terletak di jalur Pantura, atau AH2 (Asian Highway 2) membuat Kota Kudus ramai, dan maju. Bahkan Kudus adalah yang paling maju di Karesidenan Pati dan di Semenanjung Muria. Pendapatan perkapita Kudus juga yang tertinggi di Jawa tengah, karena hasil industri yang besar, serta penduduk yang tidak terlalu banyak, tetapi dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi.

Dahulu Kota Kudus bernama Kota "Tajug". Disebut Tajug karena di daerah tersebut terdapat banyak Tajug, Tajug merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai tujuan keramat. Tajug dahulunya dijadikan tempat bersembahyang warga Hindu. Dengan demikian kota Tajug dulunya sudah memiliki sifat

kekeramatan tertentu, kota ini dianggap suci bagi warga setempat yang merupakan beragama Hindu.

Ja'far Shadiq (Sunan Kudus) tidak menghilangkan makna kekeramatan dan kesucian kota Tajuk, terbukti Ja'far Shadiq (Sunan Kudus) menamai kota tersebut dengan nama Kota Kudus berasal dari bahasa Arab yang berarti Suci. Kudus bukan satu-satunya kabupaten yang menyandang nama Arab di Tanah Jawa karena Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal juga berasal dari Bahasa Arab. Pada mulanya Sunan Kudus yang sedang mencari ilmu di Arab, tepatnya di Palestina, di kota Yerusalem menghadapi sebuah wabah, lalu ditugaskan pemimpin daerah itu untuk menghentikannya, dan berhasil memusnahkan wabah tersebut. Atas nama balas budi, pemimpin daerah itu memberi tanah kepada dia, tetapi dia menolak. Sunan Kudus lebih suka membina tanah di tanah Jawa, lalu pemimpin daerah itu memberi sebuah piagam batu, sebagai tanda hadiah kepemilikan tanah. Setelah pulang ke Jawa, Sunan Kudus berdakwah di Kota Tajuk (nama Kota Kudus sebelum islam), lalu berdakwah, dan membangun masjid di sana. Kini masjid itu dikenal sebagai Masjid Menara Kudus, dan piagam kepemilikan tanah itu ditempatkan di atas mihrab, dan menandai berdirinya Kota Kudus. Sebenarnya disebut Al-Quds, tetapi karena lidah orang Jawa, cukup disebut Kudus saja.

Kabupaten Kudus memiliki beberapa julukan, yaitu:

- 1) Kota Semarak
Kudus memiliki semboyan "Semarak", kependekan dari "Sehat, Elok, Maju, Aman, Rapi, Asri, dan Konstitusional", sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota
- 2) Kota Santri
Karena banyak yang menjadi santri di Kabupaten Kudus. Kabupaten ini juga menjadi pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan dengan landmark Masjid Menara. Hal itu dapat dilihat dari terdapatnya lima makam yaitu Kyai Telingsing, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kedu, Syeh Syadzili.
- 3) Kota Kretek
Karena Kudus terdapat banyak pabrik rokok di antaranya: Djarum, Sukun, Jambu Bol, dll.

4) Kota Jambu Bol

Kota ini sangat terkenal dengan hasil pertanian jambunya terutama Jambu bol, bahkan jambu bol menjadi flora identitas resmi Kabupaten Kudus.

5) Jerusalem van Java

Masjid Menara Kudus terdapat batu dari daerah Yerusalem (*Israel*) yang batu tersebut dibawa oleh Sunan Kudus, oleh karena itu masjid yang dibangun Sunan Kudus diberi nama Masjid Al-Aqsa seperti Masjid yang berada di Yerusalem.¹

b. Kondisi Geografis

Kudus adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kota Kudus. Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok terbesar di Jawa Tengah dan juga dikenal sebagai kota santri. Kota ini adalah pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya tiga makam wali, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria dan Sunan Kedu.

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah terletak diantara 4 kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Letak Kabupaten Kudus antara 110°50' BT dan antara 6°51' dan 7°16' LS. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. luas wilayah Kabupaten Kudus mencapai 42.516 Ha atau sekitar 1,31 persen dari luas propinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Kudus berketinggian rata-rata ± 55 m di atas permukaan air laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Curah hujan relatif rendah, rata-rata di bawah 2000 mm/tahun dan berhari hujan rata-rata di bawah 97 hari/tahun. Sebagian besar merupakan daerah dataran dengan kemiringan 0-2% seluas 28.863,90 Ha (68%) yang meliputi 6 kecamatan yaitu Kota, Jati, Kaliwungu, Undaan, Mejobo, dan Kecamatan Jekulo. Sebagian kecil merupakan daerah bergelombang dengan kemiringan 2-15% selus 6.665,30 Ha yaitu Kecamatan Bae daerah curam dengan

¹ <https://id.m.wikipedia.org.kabupatenkudus.com>, diakses pada 23 Oktober 2019.

kemiringan 15-40% seluas 3.047,00 Ha yaitu sebagaian Kecamatan Gebog dan Dawe dan daerah yang sangat curam dengan kemiringan > 40% mencapai 3.939,50 Ha yang berada di Kecamatan Dawe. Fisiografi lahan terdiri dari pegunungan seluas 4.339,50 Ha, berbukit-bukit 9.312,30 Ha serta dataran 28.863,90 Ha.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan yaitu Gunung Muria. Sungai terbesar adalah sungai serang yang mengalir di sebelah barat membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus dibelah oleh sungai gelis dibagian tengah sehingga terdapat istilah Kudus Barat dan Kudus Timur.

c. Pemerintahan

Tahun 2017 Kabupaten Kudus terbagi dalam 9 kecamatan, 123 desa dan 9 kelurahan, serta 1.091 Rukun Warga (RW), 3.396 Rukun Tetangga (RT) dan 392 Dukuh/Dusun. Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut dengan nama desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa tersebut.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang lurah sebagai perangkat kabupaten dan atau daerah kota dibawah kecamatan. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Kudus adalah Kecamatan Kota dengan jumlah desa/kelurahan yaitu 25 desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Bae dengan jumlah desa (10 desa).

d. Visi dan Misi

Visi :

“Kudus bangkit menuju kabupaten modern, religius, cerdas dan sejahtera.”

Misi :

- (1) Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
- (2) Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
- (3) Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
- (4) Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.²

e. Kependudukan

Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan pemerintah maupun swasta sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data penduduk karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus hasil proyeksi penduduk pada tahun 2017 tercatat sebesar 851.478 jiwa, terdiri dari 419.212 jiwa laki-laki

(49,23 persen) dan 432.266 jiwa perempuan (50,77 persen). Persebaran jumlah penduduk menurut kecamatan paling tinggi adalah Kecamatan Jati yakni sebesar 12,83 persen dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kudus, diikuti Kecamatan Jekulo 12,76 persen, dan Kecamatan Dawe 12,72 persen. Sedangkan kecamatan yang terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bae sebesar 8,63 persen.

Bila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya, maka diperoleh rasio jenis kelamin pada tahun 2017 sebesar 96,98 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Dengan perkataan lain bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, ini bisa dilihat di semua kecamatan, bahwa angka rasio jenis kelamin di bawah 100, yaitu berkisar antara 94,12 dan 98,34.

² Pemerintah Kabupaten Kudus, "Visi dan Misi", http://kuduskab.go.id/page/visi_dan_misi diakses pada tanggal 14 Juli 2019.

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (2013-2017) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2017 tercatat sebesar 2.003 jiwa setiap satu kilo meter persegi. Di sisi lain persebaran penduduk masih belum merata. Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang terdapat yaitu 9.450 jiwa per km². Undaan paling rendah kepadatan penduduknya yaitu 1.055 jiwa per km².

Jumlah rumah tangga tahun 2017 ada sebanyak 212.365 rumah tangga, dan diporelah rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 4,01. Angka ini sama bila dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya. Jumlah kelahiran selama tahun 2017 sebanyak 13.652 bayi, terdiri dari 7.098 bayi laki-laki dan 6.554 bayi perempuan. Pada tahun 2017 diperoleh angka kelahiran kasar (CBR) sebesar 16,03 yang artinya dari 1000 orang penduduk terdapat kelahiran sebanyak 16 orang/bayi. Sedangkan jumlah kematian selama tahun 2017 sebanyak 5.748 jiwa terdiri dari 3.238 laki-laki dan 2.510 perempuan. Dengan angka kematian kasar (CDR) nya sebesar 6,75.³

f. Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Nilai realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus tahun 2017 terhitung sebesar 1.983,21 milyar rupiah dengan anggaran sebesar 2.005,53 milyar rupiah. Dana pendapatan tersebut digunakan untuk belanja daerah yang realisasinya sebesar 2.006,99 milyar rupiah dengan anggaran 2.168,21 milyar rupiah. Kalau diperhitungkan antara pendapatan dengan belanja daerah maka terjadi defisit keuangan sebesar -23,78 milyar rupiah. Realisasi pembiayaan daerah netto tahun 2017 sebesar -19,32 milyar sehingga silpa/sisa lebih -43,10 milyar rupiah.

Anggaran pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah. Dana perimbangan merupakan kontribusi terbesar dari total penerimaan, yaitu berkontribusi sebesar 66,10 persen,

³ BPS Kabupaten Kudus, *Kabupaten Kudus dalam Angka 2018* (Kudus: BPS Kabupaten Kudus, 2018), 63-65.

kemudian diikuti pendapatan asli daerah sebesar 18,46 persen dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 15,44 persen.

Penerimaan tersebut digunakan untuk belanja daerah yang meliputi belanja tidak langsung sebesar 52,78 persen dan belanja langsung sebesar 47,22 persen, dimana total realisasi belanja daerah tersebut sebesar 2.006,99 milyar rupiah.

Pada tahun 2017 terdapat 1.502 kegiatan dari dinas/satuan kerja yang ada di Kabupaten Kudus yang dananya dibiayai dari APBD Kabupaten Kudus. Total nilai pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar 1.058,77 milyar rupiah.⁴

g. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ibarat sebuah kue yang dimiliki oleh suatu daerah. Bagian yang diterima masing-masing penduduk tergantung pada besar kecilnya kue tersebut. Semakin besar kue tersebut maka makin besar bagian yang akan diterima oleh masing-masing penduduknya, dengan harapan pembagian tersebut merata dan dapat dinikmati seluruh penduduk, bukan hanya segelintir orang saja.

PDRB sebagai salah satu indikator makro dalam menilai keberhasilan pembangunan. Walaupun tolak ukur ini mulai bergeser pada tolak ukur kualitas sumber daya manusia, akan tetapi pertumbuhan ekonomi tetap memiliki kaitan erat dengan pemerataan pembangunan yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap kesejahteraan penduduk dan pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 sebesar 97,51 trilyun rupiah naik sebesar 8,43 persen. Sedangkan untuk nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar 68,65 trilyun rupiah, naik sebesar 2,97 persen dari tahun sebelumnya.

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya lapangan usaha industri masih menjadi kontributor utama, sebagai pemberi andil terbesar dalam PDRB tahun 2017. Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan untuk PDRB tahun

⁴ BPS Kabupaten Kudus, *Kabupaten Kudus dalam Angka 2018* (Kudus: BPS Kabupaten Kudus, 2018), 391-392.

2017 atas dasar harga berlaku sebesar 80,82 persen, diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,44 persen. Sedangkan kontribusi dari lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha lainnya masih di bawah 5 persen, yakni sektor pertanian sebesar 2,26 persen, sektor konstruksi 3,37 persen, sektor keuangan sebesar 1,79 persen, sektor penyedia akomodasi dan makan minum 1,16 persen.

Dari tahun 2010 kontribusi dari sektor industri pengolahan terlihat stabil. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam proses industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan proses dimana perkembangan sektor industri pada umumnya akan diikuti berkembangnya transaksi perdagangan dan menurunnya aktivitas pertanian. Terlihat bahwa selama beberapa dekade ini sektor perdagangan selalu memberikan kontribusi terbesar kedua, lebih besar dari kontribusi terbesar kedua, lebih besar dari kontribusi sektor pertanian. Besar kontribusi sektor industri menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam menompang perekonomian di Kudus, walaupun secara geografis Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil, namun dari sisi industri memiliki potensi dan peluang pasar yang dapat diandalkan.

Disisi lain kabupaten kudus kurang memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan ataupun penggalian, mengingat kondisi geografis yang ada. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya yang paling kecil, hanya sebesar 0,12 persen. Pada tahun 2017 kelompok sektor sekunder tetap menjadi kontributor utama terhadap PDRB. Kontribusi kelompok sektor sekunder pada tahun 2017 sebesar 84,26 persen, disusul kemudian kelompok sektor tersier sebesar 13,36 persen dan kontribusi terkecil adalah kelompok sektor primer sebesar 2,38 persen. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa peranan kelompok sektor primer di Kabupaten Kudus sangat kecil dominasinya dibandingkan dengan kedua sektor yang lain.

Laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Kudus tahun 2017 atas dasar harga konstan 2010 adalah sebesar 2,97 persen, yang berarti telah terjadi kenaikan riil kuantitas barang/jasa yang dihasilkan yaitu sebesar 2,97 persen dibanding tahun sebelumnya.

PDRB perkapita Kabupaten Kudus atas dasar harga berlaku untuk tahun 2017 sebesar 114,52 juta rupiah atau naik sebesar 7,16 persen. Sedangkan untuk PDRB perkapita perbulan di tahun 2017 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 9,54 juta rupiah. Hal ini berarti setiap orang rata-rata memiliki pendapatan sebesar 114,52 juta rupiah selama tahun 2017 atau rata-rata 9,54 juta rupiah setiap bulannya. Dengan PDRB perkapita yang cukup besar, dapat dikatakan bahwa tingkat kemakmuran penduduk di Kabupaten Kudus jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tingkat kemakmuran kabupaten lainnya.⁵

h. Kemiskinan

Tahun 2017 persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,01 persen. Kabupaten yang memiliki persentase kemiskinan terbesar adalah Kabupaten Wonosobo dengan persentase sebesar 20,32 persen, diikuti Kabupaten Kebumen sebesar 19,6 persen. Persentase penduduk miskin terendah di tahun 2017 adalah Kota Semarang sebesar 4,62 persen, diikuti Kota Salatiga dengan persentase sebesar 5,07 persen. Kabupaten Kudus memiliki persentase penduduk miskin sebesar 7,59 persen atau peringkat empat kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin terendah.

Dilihat kabupaten-kabupaten yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Kudus, terlihat bahwa Kabupaten Kudus memiliki persentase penduduk miskin paling kecil, diikuti Kabupaten Jepara dengan persentase 8,12 persen dan Kabupaten Pati sebesar 11,38 persen.⁶

2. Analisis Data

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, varian, dan modus.⁷

⁵ BPS Kabupaten Kudus, *Kabupaten Kudus dalam Angka 2018* (Kudus: BPS Kabupaten Kudus, 2018), 443-447.

⁶ BPS Kabupaten Kudus, *Kabupaten Kudus dalam Angka 2018* (Kudus: BPS Kabupaten Kudus, 2018), 470-471.

⁷ Duwi Prayitno, *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS* (Yogyakarta: Mediakom, 2010), 12.

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemiskinan	11	3370,00	6410,00	9780,00	7334,5455	1074,56916
Pertumbuhan	11	191,00	252,00	443,00	380,7273	61,05750
Upah	11	1090900,00	650000,00	1740900,00	1040572,182	380550,7404
Valid N (listwise)	11					

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa jumlah data penelitian (N) sebanyak 11, yaitu dilihat dari periode pengamatan. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimal sebesar 25.200 dan nilai maksimal sebesar 44.300. Nilai range merupakan selisih nilai minimal dan maksimal yakni sebesar 19.100. Rata-rata atau mean dari 11 sampel sebesar 3.807.273 dan standar deviasinya sebesar 6.105.750. Upah minimum memiliki nilai minimal sebesar 65.000.000 dan nilai maksimal sebesar 174.090.000. Sedangkan range dari 11 sampel sebesar 109.090.000 dan standar deviasinya sebesar 38.055.074. Dan rata-rata atau meannya sebesar 1.040.572.182. Kemiskinan memiliki nilai minimal 641.000 dan nilai maksimal sebesar 978.000 dengan nilai range sebesar 337.000. Sedangkan nilai rata-rata atau mean sebesar 73.345.455 dan standar deviasinya sebesar 107.456.916.

b. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah suatu data dapat dianalisa lebih lanjut maka diperlukan uji asumsi klasik agar hasil dan analisa nantinya dapat efisien dan tidak bias. Adapun kriteria pengujian asumsi klasik sebagai berikut:

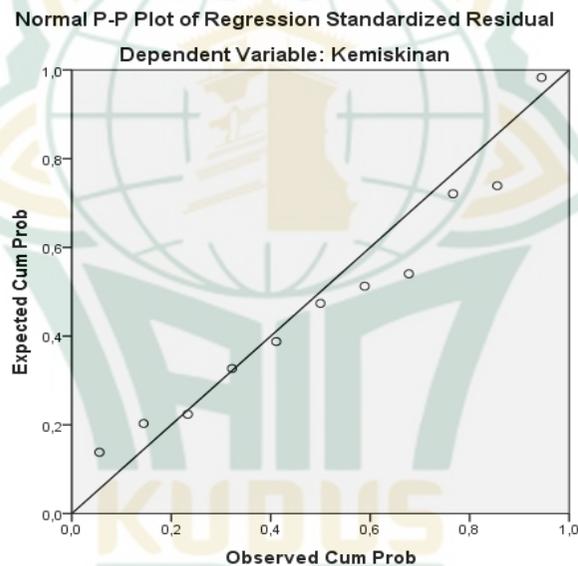
1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk uji normalitas adalah menggunakan uji normal probability plot (P-P Plot). Adapun criteria dalam uji normal probability plot sebagai berikut:

- a) Jika titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal.
- b) Jika titik-titik menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti garis diagonalnya maka hal ini menunjukkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistic* 24 dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas (P-P Plot of Regression)



Sumber: Data Sekunder yang diolah

Berdasarkan pada gambar normal P-P Plot of Regression, dapat dijelaskan bahwa garis diagonal dalam grafik ini menggambarkan keadaan ideal dari data yang mengikuti distribusi normal. Karena titik-titik di sekitar garis adalah keadaan data yang diuji. Gambar di atas menunjukkan kebanyakan titik-titik berada sangat dekat dengan garis, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh mengikuti distribusi normal atau data berdistribusi normal.

Adapun langkah lain yang dapat ditempuh untuk melakukan uji normalitas yaitu menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov Test*. Adapun dasar dalam pengambilan keputusan uji *Kolmogorov-smirnov Test* sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.
- b) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistic 24* dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	636,9654358
Most Extreme Differences	Absolute	,182
	Positive	,182
	Negative	-,112
Test Statistic		,182
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

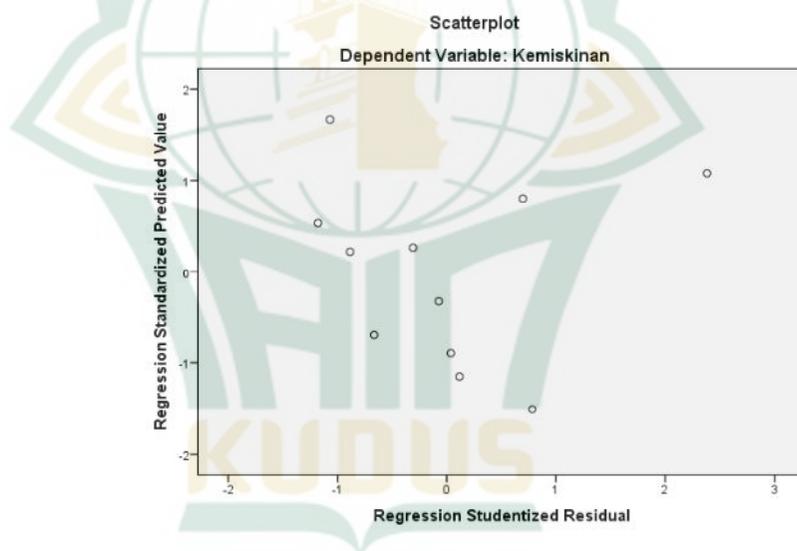
d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,2 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *kolmogorov-smirnov* di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Gejala heteroskedastisitas lebih sering muncul dalam data silang tempat (*cross section*) daripada runtut waktu. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam pengujian ini, peneliti menggunakan uji Scatterplot.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan pada grafik scatterplot di atas, dapat diketahui bahwa:

- Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.

d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a) Jika angka $VIF < 10$, maka tidak ditemukan masalah Multikolinearitas.
- b) Jika angka $VIF > 10$, maka ditemukan masalah Multikolinearitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	0,648	1,542	Tidak terjadi multikolinearitas
Upah Minimum	0,648	1,542	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan pada hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance masing-masing variabel X adalah 0,648 dan 0,648. Sedangkan nilai VIF untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 1,542 dan upah minimum sebesar 1,542. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada semua variabel penjelas model regresi yang digunakan yaitu, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum karena keduanya memiliki nilai VIF kurang dari angka 10.

Berdasarkan hasil pengujian yang tercermin dalam tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas, artinya tidak terjadi hubungan linear antar variabel bebas (independen) yang digunakan dalam model regresi.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Untuk mengetahui apakah model regresi mengandung

autokorelasi atau tidak penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson* (D-W). Kriteria dalam uji D-W adalah dengan melihat nilai D-W pada tabel *Model Summary* dan dibandingkan dengan nilai statistik (nilai dl). Jika diketahui nilai $dl < dw < du$ maka spesifikasi model empiris benar atau tidak terjadi autokorelasi.

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistic 24* dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,805 ^a	,649	,561	712,14901	2,049

a. Predictors: (Constant), Upah, Pertumbuhan

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai D-W sebesar 2,049. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% dengan jumlah data (n) 11 dan jumlah variabel bebas (k) adalah 2, maka dapat diperoleh nilai $dl = 0,7580$, $du = 1,6044$. Oleh karena nilai D-W 2,049 diantara $du < dw < 4-du$ yaitu $1.6044 < 2,049 < 2,3956$. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian menunjukkan tidak terjadi autokorelasi, sehingga keputusan diterima.

c. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui secara statistik mengenai hubungan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, metode analisis regresi berganda dipilih dalam penelitian ini. Hal tersebut agar dapat diketahui apakah pada variabel-variabel independen yang telah dipilih berdasarkan pembahasan dan teori pada bab sebelumnya mempunyai hubungan terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Dari estimasi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien
(Constant)	13114,933
Pertumbuhan ekonomi	-7,600
Upah minimum	-,003

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel 4.5 di atas dapat diperoleh persamaan regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 13115 - 7,600X_1 - 003X_2 + e$$

Berdasarkan nilai koefisien regresi dari variabel-variabel yang mempengaruhi rasio kemiskinan dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (a) adalah 13115. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel $X = 0$ maka kemiskinan akan meningkat sebanyak 13115 kali. Artinya kemiskinan akan tetap naik 13115 kali sebelum atau tanpa adanya X_1 dan X_2 yakni pertumbuhan ekonomi dan upah minimum.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (b_1) sebesar -7,600. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar -7,600%. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, semakin naik pertumbuhan ekonomi maka semakin turun kemiskinan.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel upah minimum (b_2) sebesar -0,003. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan upah minimum mengalami kenaikan, maka kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,003%. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara upah minimum dengan kemiskinan, semakin naik upah minimum maka semakin turun kemiskinan.

2) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang dapat menjelaskan porsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh garis regresinya atau variabel; independennya. Nilai koefisien determinasi terletak di antara 0 dan 1. Apabila R^2 mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen, namun apabila mendekati 0 maka yang terjadi adalah sebaliknya.

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil analisis korelasi berganda dengan menggunakan SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,805 ^a	0,649	0,561

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa korelasi yang terjadi antara variabel bebas terhadap variabel terikat diketahui $r = 0,805^a$, hal ini mengindikasikan variabel bebas pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki hubungan terhadap variabel terikat kemiskinan. Adapun hubungan yang terjadi adalah positif dan searah dengan tingkat hubungan yang tinggi.

Dari hasil analisis regresi linier berganda tersebut, diketahui bahwa koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 (R Square) besarnya 0,561. Hal ini berarti variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum yang diturunkan oleh model sebesar 56,1% terhadap kemiskinan. Variasi kemiskinan (Y) dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, jadi

sisanya sebesar (100% - 56,1% = 43,9%) yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

3) Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari derajat kepercayaan, maka peneliti menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Namun jika nilai signifikansi lebih besar dari derajat kepercayaan, maka hipotesis suatu variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi. Selain menggunakan nilai signifikansi, uji t juga dapat menggunakan t_{hitung} dan t_{tabel} . Adapun kriterianya sebagai berikut:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Hasil uji t dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistic* 24 dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji T

Variabel	t_{hitung}	Signifikansi
(Constant)	5,722	0,000
Pertumbuhan Ekonomi	-1,659	0,136
Upah Minimum	-3,775	0,005

Sumber: Data diolah dengan SPSS

- a) Pengujian pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

Dengan pengujian dua sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 0,05$ dan dengan derajat kebebasan $df (n-k) = 11-3 = 8$ diperoleh t_{tabel} sebesar $\pm 2,3060$. Karena nilai t_{hitung} bernilai negatif, maka kaidah pengambilan keputusannya adalah dikatakan berpengaruh jika nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_1 diterima dan H_0

ditolak. Hasil perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1,659. Dengan demikian $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ ($-1,659 > -2,3060$), maka tidak terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2007-2017, sehingga **H₁ ditolak**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus. Berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,136 yang lebih besar dari 0,05 ($0,136 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa **H₁ ditolak**. Artinya tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2007-2017.

b) Pengujian upah minimum terhadap kemiskinan

Dengan pengujian dua sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 0,05$ dan dengan derajat kebebasan $df (n-k) = 11-3 = 8$ diperoleh t_{tabel} sebesar $\pm 2,3060$. Karena nilai t_{hitung} bernilai negatif, maka kaidah pengambilan keputusannya adalah dikatakan berpengaruh jika nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka **H₁ diterima** dan **H₀ ditolak**. Hasil perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -3,775. Dengan demikian $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-3,775 < -2,3060$), maka terdapat pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2007-2017, sehingga **H₂ diterima**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2007-2017. Berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa **H₂ diterima**. Artinya terdapat pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2007-2017.

4) Uji Koefisien Regresin Secara Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel bebas (independen) mempengaruhi variabel tak bebas (dependen). Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil analisisnya sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji F

F_{hitung}	Signifikansi	Keterangan
7,384	0,015	Diterima

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dengan pengujian dua sisi yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 0,05$ dan dengan derajat kebebasan $df_1 = (k-1) = 3-1 = 2$ dan $df_2 = (n-k) = 11-3 = 8$, dapat diperoleh nilai f tabel sebesar 4,46. Karena f hitung bernilai positif, maka kaidah pengambilan keputusannya adalah dikatakan berpengaruh jika nilai f hitung lebih dari f tabel. Hasil perhitungan pada regresi linier berganda diperoleh nilai f hitung sebesar 7,384. Dengan demikian f hitung lebih besar dari f tabel ($7,384 > 4,46$), seperti terlihat pada tabel. Artinya pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan, sehingga **H3 diterima**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2007-2017. Berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,015 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,015 < 0,05$), sehingga disimpulkan **H3 diterima**. Artinya terdapat pengaruh positif pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara bersama-sama dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2007-2017.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kudus Tahun 2007-2017

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur utama untuk menilai perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan berkembangnya kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.⁸

Sedangkan, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kemiskinan timbul karena adanya ketimpangan dalam kepemilikan alat produksi, kemiskinan terkait pula dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat. Kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat dibawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi.⁹

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil koefisien regresi berganda diperoleh bahwa variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -7,600. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar -7,600%. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, semakin naik pertumbuhan ekonomi maka semakin turun kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2007-2017.

Dari hasil uji SPSS versi 24.0 dapat diketahui bahwa nilai $-t_{hitung}$ lebih besar dari $-t_{tabel}$ ($-1,659 > -2,3060$), jadi H_1 ditolak dan H_0 diterima yaitu secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan tingkat signifikansi sebesar $0,136 > 0,05$. Artinya H_1 ditolak atau pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2007-2017.

⁸ Ina Sholihati Cahyaningrum, Pengaruh Sektor Riil, 114-115.

⁹ Moh. Arif Novriansyah, Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan, 63.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wongdesimiwati (2009), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang dicapai sebelumnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi karena semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa semakin meningkatnya jumlah barang dan jasa sehingga semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi dan upah yang diterima oleh pekerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat akan berdampak pada tingkat kemiskinan yang menurun.

Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Apabila pertumbuhan ekonomi pada suatu masyarakat meningkat maka menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Dalam konteks Islam penerima zakat masuk ke dalam masyarakat miskin. Jika pendapatan masyarakat bertambah maka otomatis akan mengurangi kemiskinan di suatu daerah.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan *output* dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efek *trickle-down* dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme yang diperlukan

untuk memfasilitasi *trickle-down* dari keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.

2. Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kudus Tahun 2007-2017

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Penetapan upah minimum dapat dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota (UMK), berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (DPK) dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan keadaan ekonomi daerah.¹⁰

Sedangkan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual.¹¹

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil koefisien regresi berganda diperoleh sebesar $-0,003$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan upah minimum mengalami kenaikan, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar $-0,003\%$. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara upah minimum dengan kemiskinan, semakin naik upah minimum maka semakin turun kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2007-2017.

Dari hasil uji SPSS versi 24.0 dapat diketahui bahwa nilai $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $-t_{tabel}$ ($-3,775 < -2,3060$), H_2 diterima dan H_0 ditolak yaitu secara parsial upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. sedangkan tingkat signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. Artinya H_2 diterima atau upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus tahun 2007-2017.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrur Romi dan Etik Umiyati (2018), yang menyatakan

¹⁰ Rahmah Merdekawaty, dkk., "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum, 525.

¹¹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan*, 68.

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara upah minimum dengan kemiskinan.

Upah minimum berhubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini terjadi karena sektor terbesar yang mendukung perekonomian di Kabupaten Kudus adalah sektor pertanian, jasa, dan diikuti oleh perdagangan, dimana sektor pertanian dan jasa adalah sektor informal. Pada sektor informal masih belum bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kudus. Jadi peneliti menemukan hubungan yang positif antara upah minimum dan kemiskinan adalah hal yang wajar karena mayoritas pekerjaan masyarakat Kudus adalah pekerja sektor informal dan adanya faktor biaya sosial inflasi. Complain terhadap inflasi adalah hal yang umum. Kita tahu bahwa kenaikan dalam daya beli tenaga kerja berasal dari akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Biasanya upah tak bergantung pada beberapa banyak uang yang dicetak pemerintah. Jika pemerintah menurunkan inflasi dengan memperlambat tingkat pertumbuhan uang. Para pekerja tidak akan melihat upah mereka naik dengan lebih cepat. Padahal ketika inflasi lebih lambat perusahaan atau sedikit menaikkan harga produk mereka setiap tahun dan akibatnya akan memberi para pekerja kenaikan upah yang lebih kecil. Menurut teori uang klasik, perubahan dalam tingkat harga keseluruhan adalah seperti perubahan dalam unit-unit ukuran.

Dalam Islam pemberian upah harus mencakup 2 hal, yaitu adil dan mencukupi. Mereka yang mempekerjakan buruh mempunyai tanggung Jawab moral dan sosial. Artinya, seorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya harus bersung-sungguh dan penuh tanggung Jawab. Dengan begitu seorang pekerja akan dipandang baik oleh seorang yang mempekerjakan. Tetapi dalam Islam ia tidak mutlak bebas untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Ia tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar syariat.

Jika upah minimum rendah maka dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Karena dengan pendapatan yang diperoleh dari bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya jika pendapatan yang diperoleh semakin kecil maka kebutuhan hidup tidak dapat terpenuhi.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum secara Bersama-sama terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kudus Tahun 2007-2017

Pada hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus. Berdasarkan nilai koefisiensi signifikansi sebesar signifikansi sebesar 0,015 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,015 < 0,05$), dan nilai f hitung sebesar 7,384. Dengan demikian f hitung lebih besar dari f tabel ($7,384 > 4,46$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kudus.

Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan $Y = 13115 - 7,600X_1 - 003X_2 + e$. jika variabel independen lain nilainya tetap dan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar -7,600%. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, semakin naik pertumbuhan ekonomi maka semakin turun kemiskinan. jika variabel independen lain nilainya tetap dan upah minimum mengalami kenaikan, maka kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,003%. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara upah minimum dengan kemiskinan, semakin naik upah minimum maka semakin turun kemiskinan.

Hasil analisis R^2 (R Square) besarnya 0,561. Hal ini berarti variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum yang diturunkan oleh model sebesar 56,1% terhadap kemiskinan. Variasi kemiskinan (Y) dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, jadi sisanya sebesar ($100\% - 56,1\% = 43,9\%$) yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahrur Romi dan Etik Umiyati yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.